



RENCANA KERJA



TAHUN 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SOLOK**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok kedepan.

Arosuka, Maret 2024
KEPALA,

AFRIALDI, SE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1..... Latar Belakang.....	1
1.2..... Landasan Hukum.....	3
1.3..... Maksud dan Tujuan.....	5
1.4..... Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1..... Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2..... Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3..... Isu-isu Penting Penyelegaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4..... Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5..... Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1..... Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2..... Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	28
3.3..... Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
BAB V PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA BKPSDM dan Pencapaian RENSTRA BKPSDM s/d Tahun 2021.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok	17
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	20
Tabel 3.1	Tabel Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok	27
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2023	30
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	35
Tabel 4.1	Pendanaan Indikatif.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan tahun-

tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah mengacu kepada Program Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dengan hubungan keterkaitan sebagai berikut:

Dalam penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 mempedomani Misi No. 4 Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih” dengan rincian:

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang Kapabel

Indikator : Indeks Profesionalitas ASN

Sedangkan sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, pada BAB VI tabel 6.3 Program prioritas yang pada BKPSDM adalah “Peningkatan Kualitas SDM ASN” sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tata Kelola Pemerintahan

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keterangan : Pelatihan dan Diklat ASN, serta Beasiswa bagi ASN berprestasi

BKPSDM mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional BKN yang tersebar pada dua belas wilayah kerja. Ada sebanyak 7 sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara yang secara keseluruhan masih terdapat permasalahan Pelayanan di BKPSDM sehingga Penyusunan Renja Tahun 2024 diharapkan dapat mendorong pelayanan BKPSDM agar bisa sejalan dengan sasaran strategis BKN.

Selain itu BKPSDM juga memiliki hubungan fungsional dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat “Meningkatnya kualitas pengelolaan Manajemen SDM Aparatur”. Penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 selain dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2025 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi juga sebagai panduan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;

- b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada Tahun 2023 anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok adalah sebesar Rp.58.882.271.971,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.340.449.023,00 (37,94%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 55.621.911.962,- Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai (Termasuk Gaji PPPK dan CPNS), Tambahan Penghasilan ASN serta Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan realisasinya sebesar Rp.19.357.566.559 atau 34,80%.
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.037.710.009,00,- Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.2.763.302.464,- atau 90,97 %.
- c. Belanja Hibah sebesar Rp. 100.000.000,- Anggaran tersebut dihibahkan kepada 1 Lembaga Profesi ASN yaitu Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Solok, dengan realisasi sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%
- d. Belanja Modal sebesar Rp. 122.650.000,- Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan realisasi sebesar Rp. 119.580.000,- atau 97,50%.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
BPSDM Kabupaten Solok

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																					
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)		
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03			KEPEGAWAIAN			52.161.317.005		35.712.677.832		58.883.581.471		22.340.449.023								
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	38.131.535.956	100 %	30.715.835.615	100 %	56.170.926.362	100 %	19.845.108.313	103%	87%	100,00%	29.126.334.630	79.687.278.558	208,98%		
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan penganggaran	100 %	444.489.398	100 %	252.283.223	100 %	149.093.941	100 %	139.525.160	100%	88%	100%	136.550.363	528.358.746	118,87%		
5	03	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	1 Dokumen	14.734.800	2 Dokumen	8.371.800	7 Dokumen	4.101.740	7 Dokumen	3.938.900	100%	96,03%	7 dokumen	3.029.870	15.340.570	104,11%		
5	03	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.394.225	1 Dokumen	7.396.500	2 Dokumen	2.992.370	2 Dokumen	1.673.200	100%	55,92%	1 dokumen	3.332.185	12.401.885	86,16%		
5	03	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.856.200	1 Dokumen	5.930.000	2 Dokumen	2.749.250	2 Dokumen	2.612.000	100%	95,01%	1 dokumen	2.821.250	11.363.250	95,84%		
5	03	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.343.600	1 Dokumen	2.092.000	2 Dokumen	1.191.750	2 Dokumen	1.100.000	100%	92,30%	1 dokumen	1.191.750	4.383.750	131,11%		
5	03	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.523.800	1 Dokumen	7.139.800	2 Dokumen	2.701.400	2 Dokumen	2.374.000	100%	87,88%	1 dokumen	3.034.625	12.548.425	92,79%		
5	03	01	2.02	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	380.113.523	12 Laporan	217.943.123	12 laporan	134.433.431	12 laporan	126.987.060	100%	94,46%	12 laporan	121.658.683	466.588.866	122,75%		
5	03	01	2.02	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.523.250	4 Dokumen	3.410.000	4 Laporan	924.000	4 Laporan	840.000	100%	90,91%	4 laporan	1.482.000	5.732.000	87,87%		

5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban keuangan dengan aturan	100	%	37.001.918.093	100	%	29.445.887.093	100	%	55.543.042.962	100	%	19.277.825.559	97%	54%	100%	28.641.519.936	77.365.232.588	209,08%
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Asn	14	Bulan	36.988.962.093	14	bulan	29.436.662.093	487	orang	55.539.311.962	450	orang	19.275.636.559	92%	34,71%	739 orang	28.636.879.686	77.349.178.338	209,11%
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	8.842.000	1	Dokumen	6.658.000	1	874.500	2.184.000	1	laporan	795.000	100%	36,40%	1 laporan	3.093.250	10.546.250	119,27%
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	4.114.000	1	Dokumen	2.567.000	1	Dokumen	1.547.000	1	Dokumen	1.394.000	100%	90,11%	1 dokumen	1.547.000	5.508.000	133,88%
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	137.175.255	100	%	142.766.800	100	%	56.496.000	100	%	52.624.000	100%	91,19%	100%	27.000.000	222.390.800	162,12%
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	orang	27.716.850	-	orang	79.105.000	2	orang	12.530.000	2	orang	12.530.000	100%	100,00%	2 orang	27.000.000	118.635.000	428,02%
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	280	orang	81.741.555	130	orang	63.661.800	360	orang	43.966.000	360	orang	40.094.000	100%	91,19%	0 orang	-	103.755.800	126,93%
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian	40	Orang	27.716.850	0	orang	0	-	Orang	-	0	orang	-	0%	0,00%	0 orang	-	0	0,00%
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	%	248.872.121	100	%	421.538.092	100%		143.684.343			134.321.934	80%	75%	100%	76.812.476	632.672.502	254,22%
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	jenis	2.523.457	9	jenis	4.727.350	2	paket	-	0	paket	-	0,0%	0,0%	2 paket	1.419.600	6.146.950	243,59%
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	unit	52.920.000	9	unit	87.107.940	3	paket	38.250.000	3	paket	37.800.000	100,0%	98,8%	3 paket	28.555.100	153.463.040	289,99%
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	33	jenis	17.066.149	30	jenis	50.060.000	4	paket	22.434.233	4	paket	20.142.800	100,0%	89,8%	4 paket	8.857.766	79.060.566	463,26%
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	jenis	9.020.655	7	paket	32.810.100	12	paket	9.325.110	12	paket	8.674.900	100,0%	93,0%	4 paket	3.828.010	45.313.010	502,33%
							20.000	lembar		20016	lembar													
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	45	laporan	145.291.860	60	orang	246.832.702	37	laporan	73.675.000	37	laporan	67.704.234	100,0%	91,9%	37 laporan	34.152.000	348.688.936	239,99%
										30	kali													
										5	kali													
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	22.050.000	0	Dokumen	0	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0%	0,00%	0 dokumen	-	0	0,00%

5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	25.329.236	100	%	35.999.430	100	%	22.254.615		19.649.092	100%	96%	100%	22.254.615	77.903.137	307,56%	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	100	Lembar	2.315.250	100	Lembar	2.000.000	1	laporan	1.000.000	1	laporan	1.000.000	100%	100,00%	1 laporan	1.000.000	4.000.000	172,77%
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	taguhan	21.029.486	36	tagihan	30.399.430	24	laporan	19.454.615	24	laporan	16.849.092	100%	86,61%	12 laporan	19.454.615	66.703.137	317,19%
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12	tagihan	1.984.500	12	tagihan	3.600.000	1	laporan	1.800.000	1	laporan	1.800.000	100%	100,00%	2 laporan	1.800.000	7.200.000	362,81%
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100	%	273.751.853	100	%	417.360.977	100	%	256.354.501	100	%	221.162.568	143%	118%	100%	222.197.240	860.720.785	314,42%
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	unit	142.222.500	0	unit	131.327.808	2	unit	129.008.386	2	unit	118.297.856	100%	91,70%	2 unit	105.635.080	355.260.744	249,79%
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	76.237.875	4	unit	178.275.521	2	unit	74.237.378	2	unit	51.425.000	100%	69,27%	2 unit	76.480.000	306.180.521	401,61%
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirhabilitasi	1	unit	47.463.728	1	unit	87.007.648	1	unit	43.818.737	1	unit	42.474.712	100%	96,93%	1 unit	37.242.160	166.724.520	351,27%
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirhabilitasi	11	unit	7.827.750	12	unit	20.750.000	10	unit	9.290.000	13	unit	8.965.000	130%	96,50%	4 unit	2.840.000	32.555.000	415,89%
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	70	%	3.589.200.000	70	%	2.459.359.417	100	%	1.312.655.509	100	%	1.168.944.222	136%	90%	72%	1.128.888.356	3.867.476.845	107,75%
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	95	%	1.505.275.000	100	%	904.234.899	85	%	538.710.363	85	%	492.759.719	126%	115%	100%	599.589.338	1.361.903.956	90,48%
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan	(1) Buku Formasi ASN Kabupaten Solok; (2) Jumlah SK CPNS, ASN dan PPPK yang diterbitkan;	1	Dokumen	84.000.000	90	orang	480.558.969	1	Dokumen	241.115.560	1	dokumen	211.496.314	100%	87,72%	1 dokumen	31.845.000	723.900.283	861,79%
										346	orang													
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	(1) Jumlah pelamar yang terlayani; (2) Jumlah SK CPNS, ASN dan PPPK yang diterbitkan; (3) Terlaksananya pendampingan sekolah ikatan dinas		Orang SK Sekolah	735.000.000	0	0	Orang SK Sekolah	-	0 orang	-	0%	0,00%	1 dokumen	334.680.000					
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	(1) Jumlah usul pensiun PNS yang diproses tepat waktu; (2) Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan purna tugas	286	Usul Orang	159.075.000	251	orang	122.626.170	275	orang	50.307.741	281	orang	47.251.370	102%	93,92%	250 dokumen	23.045.300	192.922.840	121,28%
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	(1) Jumlah Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN; (2) Jumlah ASN yang mengikuti seleksi MTQ Korps Organisasi Profesi ASN; (3) Upacara HUT KORPRI	1	Orang Orang Kali	250.000.000			50.000.000	1	Lembaga	100.000.000	1	Lembaga	100.000.000	100%	100,00%	1 lembaga	150.000.000		

5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	(1) jumlah updating data pegawai; (2) jumlah pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan data pegawai	-	Data Kali	159.075.000	5.473 orang	152.994.300	7 Dokumen	93.431.160	7 Dokumen	91.242.198	100%	97,66%	7 dokumen	21.239.000	265.475.498	166,89%
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawalan	(1) jumlah ASN yang difasilitasi pengurusan identitas kepegawaian; (2) jumlah cuti pegawai yang diproses	200 50	Orang Orang	118.125.000	200 orang	98.055.460	150 Dokumen	53.855.902	150 Dokumen	42.769.837	100%	79,42%	250 dokumen	38.780.038	179.605.335	152,05%
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	76	%	1.310.400.000	75 %	1.217.811.894	75%	606.253.590	75%	535.830.382	111%	91%	78%	198.736.780	1.952.379.056	148,99%
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	(1) jumlah berkas mutasi yang diproses; (2) jumlah usul Pertek mutasi yang diproses; (3) jumlah SK mutasi yang diproses	500 20 500	Berkas Usul Pertek SK	386.925.000	2.500 orang	271.454.153	500 Dokumen	86.094.936	525 Dokumen	79.632.491	105%	92,49%	500 dokumen	56.714.600	407.801.244	105,40%
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	(1) jumlah usul kenaikan pangkat pegawai yang diproses tepat waktu; (2) jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian	800 50	orang orang	228.375.000	130 orang	171.346.408	800 Dokumen	103.000.500	1004 Dokumen	97.717.000	126%	94,87%	800 dokumen	25.529.500	294.592.908	129,00%
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	(1) jumlah seleksi terbuka yang dilaksanakan; (2) jumlah OPD yang dilayani dalam pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas.	2 40	kali OPD	695.100.000	8 orang	775.011.333	500 Dokumen	417.158.154	508 Dokumen	358.480.891	102%	85,93%	3 dokumen	116.492.680	1.249.984.904	179,83%
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100	%	234.675.000	100 %	55.357.800	100 %	17.958.500	100 %	11.804.450	114%	65,73%	100%	235.691.050	76.141.500	32,45%
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang diberikan izin pendidikan lanjutan	-	SK	74.550.000	- SK	0	- SK	0	- orang				4 orang	226.711.800		
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penerbitan keputusan tentang pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan dalam jabatan fungsional	-	SK	160.125.000	320 SK	55.357.800	394 orang	17.958.500	451 orang	11.804.450	114%	65,73%	394 orang	8.979.250	76.141.500	47,55%
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur	100	%	538.850.000	100 %	281.954.824	100 %	149.733.056	100 %	128.549.671	192%	86,86%	100%	94.871.188	477.052.333	88,53%
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan pengukuran kinerja PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	Laporan	80.000.000	0 Laporan	0	1 Dokumen	20.833.450	1 Dokumen	16.823.350	100%	80,75%	1 dokumen	11.500.000		
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Saytaencana Karyasatya	450	orang	127.050.000	190 orang	85.999.925	300 orang	47.244.900	576 orang	41.036.365	192%	86,86%	400 orang	25.210.950	152.247.240	119,83%
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya sidang TP4 dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	6	kali	263.550.000	100 %	195.954.899	4 laporan	64.606.706	5 laporan	55.176.956	125%	85,40%	6 laporan	48.660.238	299.792.093	113,75%
5	03	02	2.04	09	Pelayanan proses izin perceraian	Jumlah kasus perceraian PNS yang diselesaikan	-	kasus	68.250.000	0 kasus	0	2 Dokumen	17.048.000	2 Dokumen	15.513.000	100%	0,00%	2 dokumen	9.500.000	25.013.000	36,65%

5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				10.440.581.049					1.399.999.600			1.326.396.488	100%	94,74%	70%		1.529.217.195	5.393.096.483	51,66%	
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60	%	10.440.581.049	70	%	2.537.482.800	100	%	1.399.999.600	100	%	1.326.396.488	100%	94,74%	70%		1.529.217.195	5.393.096.483	51,66%
5	04	02	2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis	100	%	2.677.500.000	0		-	100	%	-	100	%	-	0%	0,00%	0%		-	-	0,00%
5	04	02	2.01	03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, lrti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	Orang	2.677.500.000	0	Orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0%	0,00%	0%		-	0	0,00%
5	04	02	2.02			Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100	%	7.763.081.049	100	%	2.537.482.800	100	%	1.399.999.600	100	%	1.326.396.488	100%	94,74%			1.529.217.195	5.393.096.483	107,43%
5	04	02	2.02	01		Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional yang Disusun	-	Laporan	-	0	Laporan	-	0	orang	-	0	orang	-	0%	0,00%	0		-	0	#DIV/0!
						- Analisis kebutuhan pengembangan Kompetensi	Jumlah dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi	1	Dokumen	157.500.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	dokumen	-					-		
5	04	02	2.02	03		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	20	orang	245.857.500	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	0,00%
						- Uji Kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional (P2UPD, Pol PP dan barang jasa)	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi pemerintahan dan teknis	30	orang	632.605.119	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	#DIV/0!				-		
5	04	02	2.02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	-	orang	5.020.026.824	20	orang	2.537.482.800	3	laporan	1.399.999.600	3	laporan	1.326.396.488	100%	94,74%	4 laporan		1.529.217.195	5.393.096.483	107,43%
							Jumlah Calon PNS yang mengikuti Lat sar	-	orang	1.699.144.225	98	orang	-	0	orang	-			0%					-		
5	04	02	2.02	08		Pembinaan, Pengor dinasian, Fasilitas pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengor dinasian, Fasilitas pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	20	Dokumen	7.947.381	0		-	0	laporan	-	0	orang	-	0%	0,00%	0		-	0	0,00%
										52.161.317.005			35.712.677.832			58.883.581.471			22.340.449.023					31.784.440.181	88.947.851.886	170,52%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini BKPSDM Kabupaten Solok belum memiliki standar pelayanan minimal bagi kegiatan bidang kepegawaian. Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Berikut pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Solok:

1. Pelayanan Internal

Pelayanan internal yang diselenggarakan Sekretariat BKPSDM bersifat koordinasi dan fasilitasi seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM, diantaranya:

a. Pelayanan Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- Pelayanan penyusunan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, Forum PD, RKA, DPA, RDPPA, DPPA, LKIP, LKPJ, LPPD dan Monev.
- Pelayanan gaji dan TPP, pencairan anggaran dan SPJ, laporan keuangan, CalK, neraca dan LRA.

b. Pelayanan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- Pelayanan administrasi surat menyurat (masuk dan keluar);
- Pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, KPE, Taspen, Konversi NIP, KGB, Kenaikan Pangkat, SKUMPTK (KP4) dan pensiun PNS internal BKPSDM;
- Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

2. Pelayanan Eksternal

Pelayanan eksternal BKPSDM dilaksanakan oleh bidang-bidang. Pelayanan ini mengacu pada tupoksi BKPSDM sebagai unsur pelaksana urusan kepegawaian di daerah. Pelayanan ini menyangkut seluruh PNS yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Solok.

a. Pelayanan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan Pengembangan Pegawai Fungsional Tertentu;

- Pelayanan jabatan fungsional tertentu (SK Pengangkatan Pertama, SK Kenaikan Jabatan, SK Pembebasan Sementara, SK Pengangkatan Kembali, Ujian Kompetensi).

Urusan Pengembangan Pegawai Struktural dan Fungsional Umum

- Pelayanan mutasi dan perpindahan dalam dan luar daerah
- Pelayanan baperjakat dan pelantikan pejabat
- Pelayanan Tugas dan Ijin Belajar

Urusan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Pelayanan informasi diklat
- Pelayanan penyelenggaraan diklat

b. Pelayanan pada Bidang Kepangkatan, Data dan Pengadaan

Urusan Kepangkatan

- Pelayanan kenaikan pangkat pegawai
- Pelayanan Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas.

- Pelayanan Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Mutasi Lain-lain PNS

Urusan Data dan Informasi

- Pelayanan data dan informasi kepegawaian (SIMPEG)
- Pelayanan bezeting pegawai

Urusan Formasi dan Pengadaan

- Pelayanan informasi seleksi penerimaan calon ASN.
- Pelayanan peningkatan status CPNS menjadi PNS dan sumpah PNS

c. Pelayanan pada Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian

Urusan Pembinaan

- Pelayanan penyelesaian kasus-kasus pegawai
- Pelayanan SKP online

Urusan Kesejahteraan

- Pelayanan Taspen, Karis, Karsu, Karpeg, Konversi NIP
- Pelayanan Satya Lancana Karyasatya pegawai;
- Pelayanan cuti pegawai.

Urusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

- Pelayanan Pensiun

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2016-2021) dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Namun demikian capaian-capaian tersebut diatas secara kelembagaan masih belum optimal yang disebabkan antara lain:

- Rendahnya profesionalisme PNS.
- Pengisian/penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada

kompetensi.

- Penilaian kinerja belum objektif.
- Penerapan peraturan disiplin belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen .
- Persoalan-persoalan internal PNS lainnya.

Hal demikian nampak pada tingkat capaian terhadap sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk itu perlu kiranya beberapa kegiatan pembangunan khususnya dalam rangka mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang lebih berdayaguna sebagai landasan pembinaan dan pengembangan karir PNS perlu mendapatkan perhatian pada periode perencanaan jangka menengah lima tahun mendatang.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2022-2026

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan			68,00%	70,00%	72,00%	75,00%	93,62%	0,00%	72,00%	75,00%	
2	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	-0,10%	0,00%	5,00%	5,00%	indikator ini sangat bersifat fluktuatif tergantung jumlah kasus pelanggaran disiplin yang di laporkan dan jumlah pegawai pada tahun berjalan
3	Persentase data kepegawaian yang akurat			98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	97,64%	0,00%	100,00%	100,00%	
4	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian			3,65	3,70	3,75	3,75	3,65	0,00	3,75	3,75	
5	Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	25,55%	0,00%	75,00%	75,00%	persentase PNS yang memiliki sertifikat juga dipengaruhi oleh komitmen pelaksanaan kegiatan diklat, dokumen pelaksanaan diklat yang dilaporkan, PNS pensiun dan mutasi serta pejabat yang dilantik
6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas kinerja			84	86	90	90	69,1	0	90	90	indikator ini sangat ditentukan oleh komitmen menindak lanjuti evaluasi AKIP tahun sebelumnya

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kompetensi ASN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

b. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Penempatan ASN sesuai dengan standar kompetensi jabatan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju *good governance*. Permasalahan ini hendaknya menjadi salah satu perhatian Tim Penilai Kinerja (TPK).

c. Belum optimalnya penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN yang melanggar peraturan disiplin.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa disiplin aparatur masih lemah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum diterapkan peraturan disiplin di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Disiplin yang lemah menyebabkan hasil kinerja dan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh seorang aparatur tidak akan maksimal.

Hal ini akan menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

- d. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.

Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan

- e. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu peningkatan guna mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan tepat.

Kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pelayanan di bidang administrasi kepegawaian merupakan salah satu kunci dalam mendorong terciptanya gairah aparatur dalam bekerja. Bila aparatur merasakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dalam pembinaan dan pengembangan karirnya maka aparatur akan merasa lebih bersemangat untuk memberikan kinerja yang lebih baik karena yakin bahwa setiap yang telah dihasilkannya akan berbuah penghargaan atas apa yang telah diraihinya.

- f. Sarana dan prasarana kantor yang perlu peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor merupakan suatu syarat agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan lancar. Disamping itu ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang representatif juga mendorong untuk menciptakan lahirnya pelayanan yang lebih memuaskan bagi yang membutuhkan dan menimbulkan kenyamanan bagi yang menikmatinya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dijelaskan dengan tabel

2.3

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
BKPSDM Kabupaten Solok

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.....)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.644.628.750	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	75,00%	3.768.660.000	
I.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.456.507.500	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	100,00%	1.580.538.750	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	88.200.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	1 dokumen	88.200.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	0 dokumen	771.750.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	1 dokumen	771.750.000	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS	263 dokumen	167.028.750	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	263 dokumen	167.028.750	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5101 lembaga	262.500.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	262.500.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dokumen	167.028.750	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4500 dokumen	167.028.750	
	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0 dokumen	-	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	250 dokumen	124.031.250	
I.2	Mutasi dan Promosi ASN				1.375.920.000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	80,00%	1.375.920.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1020 dokumen	406.271.250	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1020 dokumen	406.271.250	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	870 dokumen	239.793.750	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	870 dokumen	239.793.750	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0 dokumen	729.855.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	350 dokumen	729.855.000	

I.4	Pengembangan Kompetensi ASN			100,00%	246.408.750	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%	246.408.750	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	0 orang	78.277.500	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang	78.277.500	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 orang	168.131.250	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	372 orang	168.131.250	
I.5	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0,00%	565.792.500	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pembinaan terhadap Aparatur	100,00%	565.792.500	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	84.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	84.000.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	450 orang	133.402.500	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	450 orang	133.402.500	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 laporan	276.727.500	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 laporan	276.727.500	
	Pelayanan proses izin perceraian		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	0 dokumen	71.662.500	Pelayanan proses izin perceraian		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 dokumen	71.662.500	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				10.118.006.337	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	85,00%	10.118.006.337	
II.1.	Pengembangan Kompetensi Teknis				2.811.375.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100,00%	2.811.375.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	0 orang	2.811.375.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 orang	2.811.375.000	

II.2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			7.306.631.337	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00%	7.306.631.337	
	Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 dokumen	165.375.000	Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	1 dokumen	165.375.000		
	- Analisis kebutuhan pengembangan Kompetensi			-	- Analisis kebutuhan pengembangan Kompetensi				-	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	0 orang	930.730.500	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	30 orang	930.730.500		
	- Uji Kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional (P2UPD, Pol PP dan barang Jasa)			-	- Uji Kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional (P2UPD, Pol PP dan barang Jasa)				-	
	- Uji Kompetensi dan sertifikasi Pemerintahan dan teknis			-	- Uji Kompetensi dan sertifikasi Pemerintahan dan teknis				-	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 laporan	5.992.181.087	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 laporan	5.992.181.087		
	- Pelatihan Kepemimpinan			-	- Pelatihan Kepemimpinan				-	
	- Pelatihan dasar CPNS			-	- Pelatihan dasar CPNS				-	
	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 dokumen	218.344.750	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 dokumen	218.344.750		
	- Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi			-	- Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi				-	

III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.678.342.587	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100,00%	9.554.311.337	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			211.907.309	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100,00%	211.907.309	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	7.015.208	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7.015.208	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.714.992	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	7.714.992	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.533.636	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	6.533.636	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.379.889	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.379.889	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.038.360	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	7.038.360	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	178.792.866	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12 laporan	178.792.866	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.432.358	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.432.358	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.747.050.387	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan	100,00%	8.623.019.137	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 orang/ bulan	8.742.731.288	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	487 orang	8.618.700.038	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	2.528.253	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	2.528.253	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.790.846	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.790.846	

III.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				144.034.019	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	100,00%	144.034.019	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	29.102.693	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	29.102.693	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280 orang	85.828.633	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	280 orang	85.828.633	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	29.102.693	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang	29.102.693	
III.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.315.727	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100,00%	261.315.727	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	2.649.630	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	2.649.630	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Persediaan Kantor yang Disediakan	3 paket	55.566.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Persediaan Kantor yang Disediakan	3 paket	55.566.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 paket	17.919.456	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	17.919.456	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	9.471.688	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	9.471.688	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	152.556.453	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	152.556.453	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	23.152.500	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	23.152.500	
III.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26.595.699	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	100,00%	26.595.699	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	100 laporan	2.431.013	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	100 laporan	2.431.013	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komusikasi, Sumber Daya Air dan listrik	24 laporan	22.080.961	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komusikasi, Sumber Daya Air dan listrik	24 laporan	22.080.961	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kanotr yg disediakan	12 laporan	2.083.725	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kanotr yg disediakan	2 laporan	2.083.725	

III.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			287.439.446	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	100,00%	287.439.446	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	149.333.625	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	149.333.625
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	80.049.769	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	80.049.769
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	49.836.914	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	49.836.914
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	8.219.138	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	8.219.138
TOTAL				23.440.977.674					23.440.977.674	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok bahwa BKPSDM Kabupaten Solok mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Solok Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok pada Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok berusaha untuk menyelaraskan dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dapat dioptimalkan. Dari beberapa penyelarasan tersebut ada beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, antara lain:

Tabel 3.1

Tabel Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok

No.	Sasaran Strategis		
	BKN	BKD Propinsi Sumatera Barat	BKPSDM Kabupaten Solok
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima.		Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN.		Meningkatnya tata kelola organisasi
4	Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN.		
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN.		

6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN.		
7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja didasarkan atas rumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Penetapan tujuan strategis diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki.

Tujuan strategis di jabarkan lagi menjadi tujuan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan birokrasi yang kapabel

Tujuan 2: Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam seluruh kegiatannya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil.

Sasaran perencanaan strategis dijabarkan lagi menjadi sasaran perencanaan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN, dengan indikator:
 - a. Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan;
 - b. Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN;
 - c. Persentase data kepegawaian yang akurat;
 - d. Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian.
2. Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan, dengan indikator:
 - a. Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
3. Meningkatnya tata kelola organisasi, dengan indikator:
 - a. Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Volume/ Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 4 mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih					
1 Meningkatkan birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	1 Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	1 Persentaser formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan	%	72
			2 Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	5
			3 Persentase data kepegawaian yang akurat	%	100
			4 Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian	%	3,75
		2 Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan	5 Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75
2 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Nilai akuntabilitas kinerja	3 Meningkatnya tata kelola organisasi	6 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	90

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tahun 2025 mengelola sebanyak 3 (Tiga) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang pelaksanaannya berlokasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun program dan kegiatan yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Terdiri dari 4 kegiatan:

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

dengan 6 sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Mutasi dan Promosi ASN

dengan 3 sub kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN

dengan 2 sub kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

dengan 4 sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan proses izin perceraian

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terdiri dari 2 kegiatan:

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

dengan 1 sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

dengan 4 sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
- Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 6 kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

dengan 7 sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- dengan 3 sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- dengan 3 sub kegiatan:
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- dengan 6 sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- dengan 3 sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- dengan 4 sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rumusan rencana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2025 dan Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
BKPSDM Kabupaten Solok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03 02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penmpatan aparatur sesuai kompetensi		75,00%			3.768.660.000					3.952.093.003
03 02	2 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi		100,00%			1.580.538.750					1.657.565.689
03 02	2 01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	1 Dokumen	95%	88.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	92.610.000
03 02	2 01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	1 Dokumen	95%	771.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	1 Dokumen	810.337.500
03 02	2 01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	263 Dokumen	95%	167.028.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	250 Dokumen	175.380.188
03 02	2 01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	1 Lembaga	95%	262.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	273.625.000
03 02	2 01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	4500 Dokumen	95%	167.028.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Dokumen	175.380.188
03 02	2 01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	250 Dokumen	95%	124.031.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	250 Dokumen	130.232.813
03 02	2 02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi		80,00%		1.375.920.000					1.444.716.001
03 02	2 02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	1020 Dokumen	78%	406.271.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	426.584.813

03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan		870 Dokumen	78%	239.793.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	251.783.438
03	02	2	03	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan		350 Dokumen	78%	729.855.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	766.347.750
					Pengisian JPT Pratama, JA dan JP (376 jabatan struktural)												
03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian			100,00%			246.408.750					258.729.188
03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		5 Orang	100%	78.277.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	82.191.375
					Bea Siswa S2 dan S3 Dalam Propinsi dan Luar Propinsi												
03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		372 Orang	100%	168.131.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	394 orang	176.537.813
03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pembinaan terhadap aparatur			100,00%			565.792.500					591.082.125
03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		1 Dokumen	100%	84.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	88.200.000
03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		450 Orang	100%	133.402.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400 orang	140.072.625
03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		6 Laporan	100%	276.727.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	290.563.875
03	02	2	04	09	Pelayanan proses izin perceraian	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		10 Dokumen	100%	71.662.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen	72.145.625

04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	rasio pejabat struktural dan fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi			85,00%			10.118.006.337	9.747			10.324.297.600
04	02	2	01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kelulusan aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis			100,00%			2.811.375.000				2.951.943.750
04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelulusan aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	205 Orang		2.811.375.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	205 Orang	2.951.943.750
					Diklat Pengelola Keuangan (BP, BPP, KPA, PPTK, PPK)										
04	02	2	02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase kelulusan aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			100,00%			7.306.631.337	-			7.372.353.850
04	02	2	02	01	Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional	Persentase kelulusan aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	- 1 Laporan	100%	165.375.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Laporan	173.643.750
					- Analisis kebutuhan pengembangan Kompetensi						-				-
04	02	2	02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kelulusan aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	- 30 orang	100%	930.730.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	30 orang	977.267.025
					- Uji Kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional (P2UPD, Pol PP dan barang Jasa)						-				-
					- Uji Kompetensi dan sertifikasi Pemerintahan dan teknis						-				-

04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase kelulusan aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	4 Laporan	100%	5.992.181.087	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	5.992.181.087
					- Pelatihan Kepemimpinan (PKN/PKA/ PKP)							-					-
					- Pelatihan dasar CPNS							-					-
04	02	2	02	08	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase kelulusan aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengordinasian, Fasilitas pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	3 Dokumen	100%	218.344.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pembinaan Pengordinasian, Fasilitas pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan	3 Dokumen	229.261.988
					- Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi							-					-
03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan			100,00%			9.554.311.337					10.162.259.709
03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran			100,00%			211.907.309					222.502.672
03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	7 Dokumen	100%	7.015.208	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.365.968
03	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	2 Dokumen	100%	7.714.992	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.100.741
03	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	2 Dokumen	100%	6.533.636	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	6.860.317
03	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	2 Dokumen	100%	1.379.889	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	1.448.883

03	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	2 Dokumen	100%	7.038.360	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.390.278
03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	12 laporan	100%	178.792.866	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	187.732.509
03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	4 Laporan	100%	3.432.358	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.603.976
03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan			100,00%			8.623.019.137				9.184.402.906
03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan Aturan	-	30 Orang/ Bulan	100%	8.618.700.038	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	457 orang/bulan	9.179.867.852
					(PNS, CPNS, PPPK) = 103+250+134 = 487 org											
03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan Aturan	-	1 Laporan	100%	2.528.253	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.654.666
03	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan Aturan	-	1 Dokumen	100%	1.790.846	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.880.388
03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100,00%			144.034.019				151.235.718
03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	2 Orang	100%	29.102.693	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	30.557.827
					Diklat Analisis SDM Aparatur di Lingkungan BKPSDM											
03	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	280 Orang	100%	85.828.633	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280 orang	90.120.064
03	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	6 Orang	100%	29.102.693	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	30.557.827
03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100,00%			261.315.727				274.381.513
03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	4 Paket	100%	2.649.630	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.782.111

03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Persediaan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	3 Paket	100%	55.566.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	58.344.300
03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	4 Paket	100%	17.919.456	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.815.429
03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	6 Paket	100%	9.471.688	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.945.272
03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	50 Laporan	100%	152.556.453	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	160.184.276
03	01	2	06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	12 Dokumen	100%	23.152.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	24.310.125
03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100,00%			26.595.699				27.925.483
03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	-	100 Laporan	100%	2.431.013	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2.552.563
03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	-	24 Laporan	100%	22.080.961	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	23.185.009
03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	-	2 Laporan	100%	2.083.725	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2.187.911
03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik			100,00%			287.439.446				301.811.417
03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	-	2 unit	100%	149.333.625	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	156.800.306
03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	-	2 Unit	100%	80.049.769	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	84.052.257
03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	-	1 unit	100%	49.836.914	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	52.328.760

03	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	-	10 Unit	100%	8.219.138	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8.630.094
					JUMLAH							23.440.977.674				24.438.650.312

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya. Rencana kerja dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Pendanaan Indikatif

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	75%	Rp. 3.768.660.044
2	Rasio Pejabat Struktural dan fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	85%	Rp. 10.118.006.337
3	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	Rp. 9.554.311.337
Jumlah			Rp. 23.440.977.674

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Solok.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil yang ditargetkan.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, akan ada potensi rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Dokumen Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi target capaiannya di kemudian hari. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Solok.

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat.

Arosuka, Maret 2024
KEPALA

AFRIALDI, SE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002